

ABSTRAK

OPINI MASYARAKAT TERHADAP ISU PUTRA DAERAH MENJELANG PILKADA (Studi Kasus Pada Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2010-2015 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)

Oleh

Yessi Ertika

Pilkada yang diselenggarakan lima tahun sekali di seluruh provinsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2005. Penyelenggaraan pilkada langsung memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri secara Luber (langsung, bebas dan rahasia). Pilkada langsung juga diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi sehingga memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap isu putra daerah menjelang pilkada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam terhadap enam informan yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan opini dan pemahaman masyarakat yang berbeda latar belakang suku, pendidikan dan pekerjaan terhadap isu putra daerah menjelang pilkada. Berdasarkan data hasil wawancara, terdapat 3 (tiga) informan yang tidak setuju/kontra dengan diangkatnya isu putra daerah menjelang pilkada. Alasannya adalah karena status sebagai putra daerah tidak menjamin seorang kandidat pilkada memiliki kapabilitas dan keinginan yang kuat untuk memajukan daerahnya. Ketiga informan tersebut tidak akan memilih kandidat yang bersangkutan. Kemudian, terdapat 2 (dua) informan yang setuju dengan diangkatnya isu putra daerah menjelang pilkada, namun tetap harus melihat bagaimana visi dan misi kandidat yang akan dipilih. Alasannya adalah karena kampanye politik yang mengangkat isu putra daerah merupakan hak sang kandidat untuk berpendapat. Lalu, terdapat 1 (satu) informan yang setuju/pro dengan diangkatnya isu putra daerah menjelang pilkada. Alasannya adalah karena putra daerah pasti lebih ingin memajukan daerahnya dibandingkan dengan kandidat yang berasal dari luar daerah.

Informan yang tidak setuju/kontra secara umum berlatar belakang suku bukan asli Lampung, berpendidikan tinggi dan bekerja di sektor formal. Sedangkan

informan yang setuju berlatar belakang suku Lampung, berpendidikan lebih rendah dan bekerja di sektor informal.

Perbedaan opini masyarakat tersebut sangat dominan disebabkan karena perbedaan latar belakang pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula pemahaman politiknya. Disarankan kepada pemerintah/kandidat terpilih untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kota Bandar Lampung karena peningkatan kualitas pendidikan merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek lainnya.